

ABSTRAK

Tanah kas desa adalah salah satu aset/kekayaan desa yang sangat diharapkan hasilnya untuk mendukung roda pemerintahan desa. Sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan pendapatan perangkat desa, tanah kas desa mestinya merupakan tanah produktif. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terkait pengelolaan kekayaan milik desa mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang memberi peluang bagi desa untuk dapat melaksanakan pemindahtempaan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar, tidak hanya yang akan digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga bukan untuk kepentingan umum, dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Adapun penelitian tesis ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah di Kabupaten Kendal menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah di Kabupaten Kendal menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Kendal dan bagaimana upaya mengatasinya?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah di Kabupaten Kendal menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah di Kabupaten Kendal menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Kendal dan upaya mengatasinya.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan tukar menukar aset desa berupa tanah pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan substansi/materi dalam Permendagri tersebut masih perlu dicermati kembali, antara lain, adanya ketidakjelasan rumusan dan ketidakpastian hukum dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itulah, perlu adanya penyempurnaan ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Kata kunci : Tukar Menukar, Tanah Kas Desa, Aset Desa berupa Tanah, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

ABSTRACT

The village treasury is one of the village's assets / wealth which is highly expected to support the wheels of village government. As one source of village income and income of village apparatus, village cash lands should be productive land. With the existence of Law No. 6 of 2014, related to the management of property owned by the village has changed that is with the enactment of the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 on the Management of Village Assets, which provides an opportunity for the village to be able to implement the transfer of village assets in the form of land through exchange, not only to be used for the public interest, but also not for the public interest, and the village cash lands in addition to the public interest and not for the public interest.

The thesis research formulates the following issues:

1. How is the urgency of exchanging village assets in the form of land in Kendal Regency ?
2. How is the role of Local Government in implementing execution of exchange of village asset in the form of land in Kendal Regency according to Permendagri Number 1 Year 2016 ?
3. What are the obstacles in the execution of the exchange of village assets in the form of land in Kendal Regency according to Permendagri Number 1 Year 2016 in Kendal Regency and how to overcome them ?

While the purpose of this study are:

1. To find out and analyze the urgency of exchanging village assets in the form of land in Kendal Regency.
2. To know and analyze the role of Local Government in implementing execution of exchange of village asset in the form of land in Kendal Regency according to Permendagri Number 1 Year 2016.
3. To know and analyze the obstacles in the execution of exchange of village assets in the form of land in Kendal Regency according to Permendagri No. 1 of 2016 in Kendal Regency and efforts to overcome them.

This research method uses sociological juridical approach. Based on the specifications, this research is an analytical descriptive research.

From the results of research conducted that Permendagri Number 1 Year 2016 which serve as the legal basis for the exchange of assets in the form of land in fact can not be fully implemented. This is because the substance / material in Permendagri still need to be examined again, among others, the unclear formulation and legal uncertainty of Permendagri Number 1 Year 2016. Therefore, it is necessary to improve the provisions in Permendagri Number 1 Year 2016.

Keywords : Swap Exchange, Village Cash Land, Village Asset in the form of Land, and Permendagri Number 1 Year 2016.